

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2018**

KATA PENGANTAR

Penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 merupakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Fungsi dan Tugas pokok Dinas.

Laporan ini merupakan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

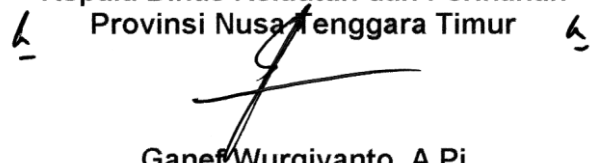
Kegiatan Tahun 2018 dievaluasi dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Dalam laporan ini dapat diukur manfaat organisasi hingga terwujudnya *Good Governance* yang lebih berkualitas, transparan dan partisipatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, semoga dapat bermanfaat.

Kupang, 2019

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Ganef Wurgiyanto, A.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 198903 1 030

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja suatu organisasi secara transparan, bersih, berhasil guna, perlu disusun laporan yang Akuntabel untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur melalui indikator kinerja input, output, outcome dan benefit bahkan sampai dengan impact.

Secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola anggaran dari 2 (Dua) sumber dana masing-masing :

1. DPA dari APBD I

Total Anggaran DPA Tahun 2018 (Belanja Publik) sebesar Rp 50.885.056.000,- untuk 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan hasil akhir pencapaian realisasi fisik sebesar 97,82 % dan keuangan 97,82 % atau Rp. 49.776.396.272;

2. Dekonsentrasi APBN Pusat.

Pengelolaan APBN secara keseluruhan mencapai Rp. 3.568.693.000,- dengan realisasi pelaksanaan fisik mencapai 93,84 % dan keuangan 93,84 % atau Rp. 3.330.964.200,-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran umum	1
BAB II. RENCANA STRATEGIS	3
A. RENSTRA Organisasi	3
1. Visi	3
2. Misi	3
3. Tujuan dan Sasaran	4
3.1. Tujuan	4
3.2. Sasaran	4
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.....	5
C. Penetapan Kinerja 2017	5
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	6
A. Analisis capaian kinerja	6
a. Indikator Kinerja	6
b. Pengukuran Kinerja	8
B. Akuntabilitas keuangan	12
C. Permasalahan yang dihadapi	12
D. Langkah-Langkah antisipasi yang diambil	13

BAB IV. PENUTUP	15
A. Kesimpulan	15
B. Saran.	15

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.
2. Realisasi Kinerja (PKT) Tahun 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk/format pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan kepada instansi pemerintah yang berisi informasi seputar pencapaian pelaksanaan rencana kerja.

Secara umum LAKIP ini bermanfaat untuk :

- Mendorong Instansi pemerintah melaksanakan good governance, secara Transparan, Sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Memberikan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*)
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LAKIP ini adalah sebagai tindak lanjut (respon) terhadap Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya adalah mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Rencana Strategik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Rencana Kerja Tahunan 2018.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 tahun 2009, tanggal 9 Juni 2009.

Jumlah pegawai yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 142 orang dengan 30 jabatan struktural dan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Jabatan Eselon II/a
- 8 Jabatan Eselon III/a
- 28 Jabatan Eselon IV/a
- 105 Fungsional Umum

Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga dalam bidang ***Kelautan dan Perikanan***.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi :

- A.** Pembinaan Umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- B.** Pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- C.** Pembinaan dan pengamanan di bidang Kelautan dan Perikanan
- D.** Pembinaan dan perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan
- E.** Penyelenggaraan Penyuluhan di bidang Kelautan dan Perikanan
- F.** Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau kecil
- G.** Pengembangan dan penguatan sistem informasi Kelautan dan Perikanan
- H.** Penyelenggaraan rehabilitasi ekosistem/habitat sumberdaya kelautan
- I.** Penelitian dan pengembangan teknologi Kelautan dan Perikanan
- J.** Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi spesifik dan/anjuran
- K.** Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- L.** Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

B A B II

RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

1. VISI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 10 ayat (2) mengamanatkan bidang kelautan dan perikanan sebagai kewenangan pilihan karena potensi sumber daya kelautan dan perikanan merupakan potensi unggulan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah dan andalan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Hal ini perlu dibarengi dengan upaya kerja keras dan kesungguhan hati, sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Oleh karena itu, visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTT YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI NKRI”**.

2. MISI

Masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya merupakan pelaku utama pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu masyarakat adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan secara berkelanjutan, yang diarahkan pada keharmonisan antara kesejahteraan, pemerataan , pertumbuhan, dan berkelanjutan, sesuai dengan daya dukung lingkungan. Untuk itu, misi pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- 1) Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur;
- 2) Meningkatkan kemampuan, keterampilan SDM dan daya saing dalam menguasai dan menerapkan inovasi teknologi yang terbaru dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berorientasi ekspor.
- 3) Meningkatkan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjaga kualitas dan ekosistem lingkungan.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan
- 5) Meningkatkan kemampuan dan kinerja aparatur untuk mewujudkan good governance dan clean governance.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi dan Misi tersebut di atas, pada hakekatnya ditujukan untuk :

3.1. TUJUAN:

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangun-an jangka menengah adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya;
- 2) Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian daerah Nusa Tenggara Timur;
- 3) Meningkatkan Daya Saing Provinsi NTT dalam Produksi dan Nilai Produksi Perikanan melalui Industrialisasi dan berorientasi ekspor.
- 4) Mewujudkan kondisi lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan terciptanya kelestarian daya dukung;
- 5) Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Nusa Tenggara Timur;
- 6) Meningkatkan peran laut sebagai pemersatu dan menguatnya budaya bahari masyarakat Nusa Tenggara Timur.
- 7) Mendorong kecukupan pangan dan pemenuhan gizi bagi masyarakat.
- 8) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT
- 9) Membuka lapangan Pekerjaan
- 10) Mendorong Kontribusi Provinsi NTT terhadap PDRB dan penerimaan Negara

3.2. SASARAN :

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- 1) Peningkatnya usaha dan kualitas sumberdaya manusia kelompok sasaran program (Nelayan, pembudidaya dan Pengolah/pelaku usaha).
- 2) Peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Penurunan tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 4) Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat;
- 5) Terciptanya kesadaran masyarakat bahwa laut sebagai sumber mata pencaharian, peningkatan pariwisata dan budaya bahari serta pemersatu bangsa.

- 6) Peningkatan potensi bahari (*biodiversity*);
- 7) Peningkatan kualitas produk olahan perikanan;
- 8) Peningkatan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah;
- 9) Terciptanya lapangan pekerjaan baru di bidang kelautan dan perikanan;
- 10) Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

B. RENCANA KINERJA

Bertolak dari kebijakan umum di atas guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Nusa Tenggara Timur, dirumuskan suatu kebijakan strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu: ***Pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara optimal, efisien dan berkelanjutan***”.

Dari kebijakan strategis di atas, secara regional maupun sektoral dirumuskan 2 (dua) program strategis dengan pokok-pokok kegiatan masing-masing:

I. Program yang didanai dari anggaran Dekonsentrasi :

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP (01)
- B. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (03)
- C. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya (04)
- D. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (05)
- E. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (06)
- F. Program Pengelolaan Ruang Laut (07)

C. PENETAPAN KINERJA 2018

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Kinerja Tahun 2018 sesuai terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan dikategorikan dalam kelompok :

1.1. Masukan (Inputs)

Segala sesuatu yang diperlukan sehingga pelaksanaan kegiatan dan program dapat terlaksana.

1.2. Keluaran (Outputs)

Segala sesuatu yang berupa produk / jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

1.3. Hasil (Outcomes)

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

1.4. Manfaat (Benefits)

Kegunaan suatu keluaran yang dirasakan oleh masyarakat

1.5. Dampak (Impact)

Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang diawali oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja:

b. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Dari 3 sasaran strategis yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 maka hasil capaian pengukuran kinerja sasaran dapat jelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang paling utama untuk dicapai Tahun 2018 adalah : total Produksi Perikanan sebesar 2.094.524,86* Ton dengan rincian Produksi Perikanan Tangkap sebesar 141.135,32 * Ton dan Produksi Perikanan Budidaya (rumput laut) sebesar 1.935.524,54* Ton, ekspor sebesar 1.281,16 ton, Angka konsumsi ikan tingkat Provinsi NTT tahun 2018 belum bisa di hitung dikarenakan kegiatannya tidak bias dilaksanakan. Untuk menunjang pencapaian komponen pokok ini diperlukan penambahan fasilitas sarana dan prasarana baik yang langsung diterima sasaran maupun pada

pusat-pusat pengembangan perikanan, peningkatan pengetahuan - ketrampilan dan operasional Unit-Unit Pelaksana Teknis Daerah

.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan kegiatan tahunan. Hasil analisis terhadap pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

2.1 Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Kesejahteraan Nelayan

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatnya produktivitas perikanan budidaya, perikanan tangkap sehingga meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan tangkap maupun pembudidaya ikan. Program – program yang mendukung sasaran ini adalah program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap. pada tahun 2018 program pengembangan budidaya perikanan dan program perikanan tangkap mendapatkan total anggaran sebesar Rp. 31.521.762.608 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.27.965.317.592 (47,01 %) jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 59.487.080.200 dengan rincian anggaran Program Pengembangan Budidaya Rp. 3.454.145.038 dan Program Perikanan tangkap sebesar Rp. 28.067.617.570.

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2017	2018		Capaian (%)	Renstra 2018	2014	2018
				Target (Ton)	Realisasi (Ton)				
1	Prosentase Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	138.367,86	112.840	141.135,32 *	125,08	104.073	107,977.28	145.286,39 *
2	Prosentase Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya (rumpuk Laut)	Ton	1.935.026,08	1.913.242,32	1.953.524,54*	102,11	360,861	250,000	2.038.793.,14*

2.1.1 Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Prosentase produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 yaitu 125,08 % atau 141.135,32* Ton dibandingkan dengan target 2018 yaitu 112.840 Ton meningkat dikarenakan adanya pemberian bantuan sarana penangkapan berupa alat tangkap dan

kapal tangkap terhadap nelayan sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat produksi perikanan tangkap sehingga tingkat pendapatan nelayan semakin meningkat.

2.1.2. Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Prosentase produksi perikanan budidaya pada tahun 2018 yaitu 102,11 % atau 1.953.524,54* Ton dibandingkan dengan target 2018 yaitu 1.913.242,32 Ton meningkat dikarenakan adanya pemberian bantuan sarana budidaya serta bibit rumput laut, sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat produksi perikanan tangkap sehingga tingkat pendapatan pembudidaya semakin meningkat.

2.2 Penurunan Tingkat Kerusakan Ekosistem dan Tingkat Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sasaran ini di tujukan pada kawasan konservasi laut, areal hutan mangrove yang di koservasi serta penurunan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Program – program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produk perikanan dengan anggaran Rp. 2.821.199.400,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Empat Ratus Rupiah)

Tabel 2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Prosentase Kawasan Konservasi Laut, Hutan Mangrove , dan Penurunan Tingkat Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2017	2018		Capaian (%)	Renstra 2018	2014	2018
				Target	Realisasi				
1	Jumlah Kawasan Konservasi Laut	%	1			0	30	20	0
2	Prosentase areal hutan magrove yang di konservasi	%	16.593,19 Ha		1 Ha	100		16.593,19 Ha	16.594,19 Ha
3	Prosentase Penurunan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100	85	100	100	95	48	100

2.2.1 Jumlah Kawasan Konservasi Laut

Sama seperti tahun 2017 untuk tahun 2018 tidak ada penambahan kawasan konservasi.

2.2.2. Prosentase Areal Hutan Mangrove yang di Koservasi

Prosentase Areal Hutan Mangrove yang dikonservasi Pada tahun 2018 yaitu 100 % di karenakan pada 2018 untuk konservasi tidak mempunyai target, akan tetapi pada tahun 2018 ada penanaman anakan mangrove di Kabupaten Sikka sebanyak 6.000 anakan atau 1 Ha.

2.2.3. Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Pemafaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2018 sebanyak 100 % di karenakan tingkat kesadaran nelayan telah baik, dalam gelar operasi bersama yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi Perairan dan TNI AL.

2.3. Meningkatnya Kontribusi dan Produktifitas Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Perekonomian

Sasaran ini ditujukan pada sumbangan sektor perikanan dan kelautan terhadap perekonomian daerah Nusa Tenggara Timur, yang mana sasarannya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ekspor Perikanan, Penyerapan tenaga kerja program – program yang mendukung sasaran ini yaitu Program Pengembangan Penyuluhan, Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi
Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Perekonomian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2017	2018		Capean	Restra 2018	2014	2018
				Target	Realisasi				
1.	Jumlah Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah	%	1.803.028.169	1.125.125.000	1.302.191.600	115,74	3.500.000.000	1,170,288,679	1.301.191.600
2.	Ekspor Perikanan	Ton	720,89	3.300	888,50	115,72	4.200	681,40	1.281,16
3.	Rumah Tangga Perikanan Tangkap	Orang	98.334	68.559	99.552	115,13	68.559	186.081	99.552

2.3.1. Prosentase Jumlah Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah

Prosentase jumlah kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah tahun 2018 yaitu 115,74 % atau Rp.1.302.191.600.

dibandingkan dengan target tahun 2018 Rp. 1.125.125.000 maka PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melebihi target sebesar Rp 176.826.600.

2.3.2. Prosentase Ekspor Perikanan

Prosentase Ekspor Perikanan pada tahun 2018 yaitu 177,72 % atau 1.281,16 ton mengalami kenaikan sebesar sebesar 560,27 ton di bandingkan ekspor pada tahun 2017 yaitu sebesar 720,89 ton.

2.3.3. Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Kumulatif

Prosentase penyerapan tenaga kerja rumah tangga perikanan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 33.184 unit atau (45,21%) dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 32.778 unit dikarenakan adanya bantuan kapal, serta hasil lulusan sekolah usaha perikanan (SUPM) yang ada di NTT.

2.4. Meningkatnya Kemampuan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Sasaran ini diarahkan untuk peningkatan sumber daya manusia yang handal. Adapun sasaraannya yaitu tenaga teknis yang ada pada dinas kelautan dan perikanan provinsi, yang mana mereka akan diberi pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Program – program yang mendukung sasaran ini adalah Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Pendamping Perikanan, Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keragaman Produk Hasil Perikanan, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan Pasar daalam Negeri dan Inovasi Pengolahan,,alokasi anggaran kegiatan Rp. 3.492.831.732 (tiga Miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2017	2018		Capean	Restra 2018
				Target	Realisasi		
1.	Jumlah Sumber daya manusia						
	Diklat Pengawas Perikanan	%	0	30	30	100	102

2.4.1. Prosentase Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mengikuti Diklat Pengawas Perikanan

Prosentase Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Diklat Pengawas Perikanan yaitu sebesar 100 % dari targer 30 orang peserta. Jumlah peserta sebanyak

30 orang yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dan DKP Kab. Alor, Kab Lembata, Kab Manggarai Timur. Dengan hasil terciptanya tenaga teknis pengawas perikanan sebanyak 30 orang.

2.5. Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat

Sasaran dalam rangka meningkatnya pola konsumsi ikan pada masyarakat, baik untuk konsumsi masyarakat didalam keluarga, luar keluarga (hotel warung penyedia olahan ikan) maupun konsumsi olahan perikanan (ibu hamil, ibu menyusui, bawa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun serta anak sekolah dasar yang di laksanakan di 3 kabupaten (TTU, Flores Timur dan Lembata)

Kegiatan perhitungan Angka konsumsi ikan tingkat Provinsi NTT tahun 2018 tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu melakukan survei,penentuan metode dari pihak perguruan tinggi dan dan instasi terkait sehingga angka perhitungan konsumsi ikan untuk tahun 2018 belum bisa di hitung. Sedangkan untuk tahun 2017 angka konsumsi ikan yaitu 39.81 kg/kapita/tahun.

Tabel 5

Capean Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2017	2018		Capean %	Restra 2018	2014	2018
				Target	Realisasi				
1.	Konsumsi Ikan	%	34,56 Kg/Kapita/Tahun	25,15 Kg/Kapita/Tahun	Kg/Kapita/Tahun		27,03 Kg/Kapita/Tahun	28,15 Kg/Kapita/Tahun	34,56 Kg/Kapita/Tahun

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program /kegiatan pada dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 bersumber pada APBN dan APBD dengan rincian sebagai berikut :

ALOKASI DAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

No	SUMBER DANA		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	APBD		50.885.056.000	49.776.396.272	97,82
	a.	Belanja Tidak Langsung	12.113.494.000	12.113.494.000	100
	b.	Belanja Langsung	38.771.562.000	37.662.902.272	97,14

1.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan,		3.454.145.038	3.113.515.050	90,24
2.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap,		28.067.617.570	27.747.567.150	98,86
3.	Program Pengembangan Penyuluhan,Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		4.594.761.154	4.274.109.286	93,02
2.	APBN				
	a.	Dekonsentrasi	3.568.693.000	3.330.964.200	93,84
		Sekretariat Jenderal (01)	800.000.000	800.000.000	100
		Ditjen Perikanan Tangkap (03)	596.802.000	590.900.000	99,01
		Ditjen Perikanan Budidaya (04)	477.163.000	473.903.400	99,32
		Ditjen PSDKP (05)	551.878.000	339.806.000	61,57
		Ditjen P2HP (06)	337.850.000	328.818.800	97,33
		Ditjen KP3K (07)	805.000.000	797.536.000	99.97

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. APBD.

A. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Kurang SDM yang kualisasi pendidikan sarjana perikanan
2. Sarana dan prasarana pada UPT Perbenihan khususnya BBIS Noekele banyak kolam yang bocor.
3. Kurangnya pelatihan bagi pembudidaya rumput laut serta kuranya bibit rumput laut bagi kelompok pembudidaya
4. Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota.
5. Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada.

2. Upaya pemecahan Masalah

1. Penambahan tenaga teknis yang kualifikasi sarjana perikanan budidaya
2. Perlu memperbaiki sarana prasarana budidaya air tawar
3. Perlu bimtek bagi kelompok pembudidaya rumput
4. Gelar operasi bersama harus lebih dilakukan
5. Rehabilitasi mangrove

B A B V *P E N U T U P*

A. Kesimpulan

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 terealisasi sebagai berikut :

- a. Total Dana yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dari APBD I (belanja Publik) mencapai Rp. 50.885.056.000,- Realisasi pelaksanaan selama Tahun 2018 secara keseluruhan mencapai Fisk 99,42 % dan Keuangan Rp. 49.776.396.272 ,- (97,82%).
- b. Pengelolaan APBN secara keseluruhan mencapai Rp. **3.568.693.000,-** dengan realisasi pelaksanaan fisik mencapai 99,27 % dan keuangan 93,84 % atau Rp. **3.330.964.200**
- c. Realisasi komponen target Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 adalah :
 - Produksi Perikanan tercapai 2.094.524.86* Ton dari target 2.177.161.01* Ton.
 - Ekspor Perikanan mencapai 1.281,16 Ton
 - Penerimaan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 1.302.191.600,- atau 115,74 % dari target Rp. 1.125.125.000,-

B. Saran

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Satker di lapangan khususnya mendukung realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara kumulatif, melalui DPA perlu disediakan biaya pendamping Satker APBN secara berkesinambungan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi melalui berbagai program dan Satker di Tahun 2018, semoga bermanfaat.
